

# HARGA DIRI DALAM FILOSOFI MANUSIA JAWA

*Mohammad Damami*

## PENGANTAR

Yang dimaksud “manusia Jawa” di sini adalah manusia etnis Jawa, terlepas di mana tempat tinggalnya saat ini. Dahulu, sebelum terjadi mobilitas sosial horizontal yang didukung oleh kemajuan dan kecanggihan peralatan transportasi, manusia Jawa masih terpusat pada tempat tinggalnya di pulau Jawa. Kalau dilihat dari perspektif peta geografi sekarang ini, maka manusia Jawa banyak bertempat tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berkaitan dengan “manusia Jawa”, pertanyaan lebih jauh adalah kapan munculnya etnis Jawa itu. Belum ada penjelasan rinci tentang hal ini, baik secara arkeologis, apalagi secara historis. Namun, bukti-bukti di lapangan seperti ditemukannya “Homo Soloensis”, “manusia Trinil”, “manusia Wajak”, “manusia Ngandong”, dan sebagainya, menunjukkan bahwa manusia Jawa sudah ada sejak lama<sup>1</sup>. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan mulainya berkembang apa yang disebut “Kebudayaan Jawa”. *Pertama*, ada yang mengatakan bahwa kebudayaan Jawa dimulai sejak kedatangan Ajisaka, yang konon dari India Selatan, yang kedatangannya dituliskan pada tahun 78 M atau tahun 1 Saka. Dengan demikian sejak abad ke-1 M, kebudayaan Jawa

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 30-33.

mulai terekam dan hal ini ditandai dengan munculnya penulisan huruf Jawa.<sup>2</sup> *Kedua*, ada yang mengatakan dimulai sejak kerajaan Holing atau kerajaan Kalingga berdiri dan ratu terkenal yang pernah memerintah adalah Ratu Sima (674 M) yang sebagian orang menduga tempatnya di daerah Kedu, Jawa tengah, tetapi ada yang menduga di wilayah Selat malaka.<sup>3</sup> Dengan demikian abad ke-7 M menandai kejelasan dimulainya perkembangan kebudayaan Jawa.

Sekalipun manusia Jawa di atas telah diduga sudah demikian kuna, termasuk keduanya, namun berdasar hasil penelitian Andrik Purwasito, mentalitas Jawa sedikit-banyak terpengaruh oleh filsafat Hindu yang kemudian melahirkan mentalitas *sinkretis* manusia Jawa. Dari sinilah kemudian timbul pertanyaan bagian mana yang boleh dikatakan “asli” dari manusia Jawa, apalagi dari “filosofi manusia Jawa”. Yang jelas, manusia Jawa adalah manusia yang boleh dipandang mahir dalam mengolah dan memodifikasi apapun yang masuk ke dalam kalangan komunitas manusia Jawa tersebut. Manusia Jawa terkenal mampu “*ngeluk*” (bahasa Jawa, merangkul) pihak lain yang masuk ke dalam komunitasnya, apakah itu beda etnis, bahasa, budaya dan agama.

Tulisan ini mencoba sedikit memberi gambaran dari salah satu topik filosofi manusia Jawa, yaitu masalah harga diri. Hal ini dipandang penting karena masalah ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pembentukan karakter bangsa yang dewasa ini banyak dipertanyakan orang. Kata orang, bangsa Jepang maju karena memiliki karakter yang kuat dalam beberapa hal, misalnya jujur, bersih, hemat, kerja keras, dan menjaga diri dari kemungkinan malu (*wirang*, bahasa Jawa). Barangkali pembentukan karakter ini memang sudah sangat mendesak di negeri Nusantara tercinta ini.

---

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, hlm. 19.

<sup>3</sup> Badrika, I Wayan dan Setiadi Sulaeman, *Sejarah Nasional dan Dunia*, Jilid I (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm. 60-61.

## GREAT & LITTLE TRADITION DALAM STRATIFIKASI MANUSIA JAWA

Bagaimanapun harus diakui, bahwa dalam komunitas manusia Jawa itu masih tampak jelas sisa-sisa pandangan yang bersifat dikotomis, antara lain konsep “ningrat/keraton” dan “*wong cilik/ rakyat biasa*”. Hal ini terbentuk karena sejak awal budaya Jawa dibentuk oleh sistem pemerintahan kerajaan, dalam hal ini kerajaan Hindu. Tidak dapat disangkal latar belakang doktrinal yang berupa ajaran tentang kasta sangat berpengaruh di sini. Susunan kelompok sosial brahmana, ksatria, waisya, dan sudra tampak terimplementasi dalam stuktur anggapan masyarakat Jawa. Bahwa kalangan ningrat/keraton adalah pusat dan pembentuk kebudayaan (menjadi *great tradition* menurut Robert Redfield), baik dalam kebudayaan material maupun kebudayaan immaterial, antara lain dalam pandangan hidup. Misalnya saja dalam hal pandangan hidup tentang “harga diri”.

*Great tradition* yang berpusat di kalangan ningrat/keraton di atas diwarnai oleh dua hal, yaitu, *pertama*, orientasi pada kekokohan *kekuasaan politik*. Sekalipun dalam susunan kasta diatur bahwa kasta ksatria adalah dibawah satu tingkat kasta brahmana, namun dalam praktiknya kasta ksatria, dalam hal ini kalangan ningrat/keraton sangat dominan dalam stuktur kebudayaan Jawa. Paradigma politik ini mengandung arti bahwa dalam masyarakat Jawa ada kecenderungan kewibawaan politik itu ditentukan oleh “jarak”, yakni jarak sosial. Untuk itu, menurut sejarawan G. Moedjanto, martabat orang banyak ditentukan oleh gelar yang disandangnya.<sup>4</sup> Dengan diciptakannya jarak sosial ini, maka diperlukan penjagaan agar jarak sosial tersebut tidak berubah. Untuk itu diciptakan piranti-piranti penjaganya, antara lain dalam hal *cara pandang* (filosofi) dan *tata cara pergaulan*. Dengan cara-cara seperti ini maka menjadi jelas garis

---

<sup>4</sup> G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 21.

pemisah antara satu kelompok sosial tertentu (misalnya *ningrat*) dan kelompok sosial lainnya (misalnya *wong cilik*). Pada zaman pemerintahan Paku Buwana X, sebagai misal, pada zaman tersebut dikembangkan pandangan bahwa raja adalah *wewakiling Pangeran Kang Ageng, kalipah*, yang mendapat 3 (tiga) macam wahyu, yaitu (1) wahyu *nurbuwah* atau wahyu yang melegitimasi untuk menjadi raja meliputi seluruh jagad raya, (2) wahyu *kbukumah* [sic !] atau raja semesta, dan (3) wahyu *wilayah* atau wahyu yang mengesahkan bahwa raja adalah wali Tuhan dan menjadi teladan seluruh kawula.<sup>5</sup> Selanjutnya, untuk membentengi wibawa yang sedemikian tinggi kedudukan raja maka diciptakan *tata cara pergaulan* yang diwujudkan dengan pemantapan *sistem simbol*, misalnya dalam hal pakaian dan penghormatan, antara lain<sup>6</sup> karena raja adalah puncak keindahan, kemahalan, dan kemewahan, maka *pakaian* juga dibedakan tajam dengan pakaian kawula (rakyat). Pakaian raja dan *sentana dalem* dipegang erat dengan aturan yang ketat. Selanjutnya, cara *penghormatan* kepada raja juga diatur ketat, antara lain dalam hal hierarki dalam pemakain bahasa, antara lain bahasa keraton (*basa kedhaton*), bahasa *krama*, dan bahasa *ngoko*. Ungkapan untuk menunjukkan keluhuran keturunan raja dirumuskan dengan kata-kata “*trahing kusuma, rembesing madu, wijining tapa, tedbaking andana warib* (keturunan bunga, tetesan madu, bakat pertapa, turunan kemuliaan).<sup>7</sup>

Dengan dasar uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa *great tradition* yang didasarkan pada pengokohan orientasi kekuasaan politik sangat tampak nyata dalam bangunan budaya ningrat/keraton. Oleh karena itu, pandangan hidup atau filosofi manusia Jawa masuk akal kalau berbasis budaya ningrat/keraton ini. Budaya di luar budaya ningrat/keraton hanyalah sebagai tradisi kecil (*little tradition*) yang hanya berlaku diselingkar lokal tertentu, atau paling tinggi

---

<sup>5</sup> Kuntowijoyo, *Kebudayaan Jawa*, hlm. 22.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 23-28.

<sup>7</sup> Supriadi, *Kyai dan Priyayi di Masa Transisi* (Surakarta: Pustaka Cakra Surakarta, 2001), hlm. 97.

hanyalah sebagai subkultur saja dari budaya ningrat/keraton yang dominan di Jawa. Perlu diketahui, yang tampak menjadi tradisi kecil di Jawa khususnya adalah budaya petani yang hidup di pedesaan. Nanti dalam perkembangannya, budaya ningrat/keraton ini bergeser pusatnya menjadi *budaya urban* (budaya kekotaan) yang pada akhirnya banyak yang merembes pengaruhnya ke wilayah *budaya rural* (budaya kedesasaan). Dalam zaman modern sekarang ini kota merupakan tempat persemaian dan tempat subur birokrasi, kekuatan politik, dan ekonomi. Karena itu, standar budayanya juga akan mewarisi dominasi *great tradition* model ningrat/keraton di atas yang orientasinya adalah tatanilai kekuasaan politik yang jauh lebih menonjol dibanding tatanilai *kesadaran humanitas* dan tata nilai *agama*, misalnya. Dapat dikatakan “budaya ningrat/keraton” pindah ke “budaya *urban/kekotaan*”. Karena itu standar etika “ningrat/keraton” atau etika “*urban/kekotaan*” akan lebih tampak mengemuka dan pada hakikatnya tidak mau atau tidak rela kalau disamakan atau dikalahkan oleh budaya “*wong cilik/rakyat biasa*” atau budaya “*rural/kedesasaan*”.

*Kedua*, orientasi pada kesukaan terhadap *mistisisme*. Kata Niels Mulder, “. . . kebanyakan mereka [orang Jawa], kebatinan atau dimensi pusat kehidupan adalah sisi yang paling menarik: acap kali mereka melihatnya sebagai inti sari kebudayaan mereka”.<sup>8</sup> Kecenderungan suka terhadap hal-hal yang berbau mistisisme ini antara lain juga sedikit-banyak terpengaruh oleh budaya spiritual Hindu dan Buddha sebelumnya. Bahwa kedua agama ini sangat bertekanan kuat pada ajaran mistisisme itu. Tatkala agama Islam masuk ke Nusantara, lebih khusus lagi ke pantai utara Pulau Jawa, agama Islam juga memperkenalkan tasawuf (mistisisme Islam). Bahwa salah satu aliran pemikiran tasawuf, dalam hal ini yang dipelopori oleh Seh Siti Jenar, tampaknya dekat dengan mistisisme Hindu, misalnya ajaran Brahmanisme yang pada intinya mengkonsepsikan terlepasnya *atman* dari *Brahman*.

---

<sup>8</sup> Niels Mulder, *Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. viii.

Orientasi mistisisme adalah masalah kesucian hidup. Dalam bahasa manusia Jawa disebut “*ilmu kasampurnan*” (ilmu yang mengantarkan manusia menjadi manusia sempurna dan suci dan akan kembali ke alam kelanggengan). Kalangan ningrat/keraton sangat mengapresiasi terhadap mistisisme ini. Ada beberapa keuntungan yang ingin diraih. *Keuntungan pertama*, untuk memperkokoh kekuasaan politik raja. Bahwa dalam mistik yang dipokokkan adalah masalah usaha mendekat atau bahkan bersatu dengan yang disebut Tuhan. Sementara itu raja adalah “*pengejawantahan Gusti*” (tampilan luar dari Tuhan) yang dalam kalangan sejarawan disebut dengan sebutan “*God-king*” (Tuhan-raja, dewa-dewa). Dengan demikian dalam menghadapi raja, maka “*wong cilik/rakyat biasa*” tidak pada tempat main-main. Karena itu, posisi raja makin kokoh kalau dilihat dari sudut pandang ini. Karena itu pula, hampir mustahil ada raja yang diberontak atau digulingkan oleh rakyatnya. Andaikata terjadi pemberontakan atau penggulingan raja, maka pemantiknya adalah berebut kekuasaan antara keluarga raja itu sendiri atau intrik kepentingan di lingkaran keluarga ningrat/keraton. *Keuntungan kedua*, keraton seolah-olah mampu menjadi simbol kesucian batin. Dengan adanya anggapan ini, keluarga ningrat/keraton di mata *wong cilik/rakyat biasa* bersih dari kekurangan, cacat, keburukan, dan kelimahan. Dengan demikian keluarga ningrat/keraton tetap dianggap “ideal” sekalipun dalam faktanya kehidupannya dipenuhi dengan misteri yang tersembunyi. Bisa saja kalau dilihat dari luar bersinar terang, tetapi sebenarnya dibagian dalam penuh suasana gelap dan pengap. Tampaknya telah tertanam, khususnya dalam bawah sadar di kalangan *wong cilik/rakyat biasa*, bahwa “idealisme” dari keraton harus dimenangkan dan lebih ditonjolkan daripada berbincang dan mengorek berbagai fakta-fakta yang sesungguhnya.

Oleh karena sedemikian ketatnya hubungan mistisisme ini di kalangan manusia Jawa, maka tidak heran kalau istilah “filsafat Jawa” dipakai secara bolak-balik dengan istilah “mistisisme Jawa”, yang mestinya dapat dipisahkan secara distingtif. Tetapi demikianlah kenyataannya.

## HARGA DIRI MANUSIA JAWA

Pandangan hidup mengenai harga diri di kalangan manusia Jawa sangat dipengaruhi oleh konstruksi budaya ningrat/keraton di atas. Bahwa faktor “kekokohan kekuasaan politik keraton” dan faktor “misticisme” merupakan 2 (dua) pembingkai dan sekaligus pengukur terhadap format pandangan hidup tentang harga diri tersebut.

Ada beberapa contoh ungkapan yang menunjukkan tentang harga diri yang dikemas oleh 2 (dua) faktor di atas. *Pertama*, ungkapan terkait dengan “harga manusia”. Dalam *Serat Wedhatama* disebutkan demikian: *Bonggan kang tan merlokena, mungguh ugering ngaurip, uripe lan tri pakara, wirya artha tri winasis, kalamun kongsi sepi, saka wilangan tetelu, telas tilasing jalma, aji godhong jati aking, temah papa papariman ngulandara*<sup>9</sup>. Di sini, harga manusia ditentukan dan diukur oleh tiga hal secara berurutan, yaitu *wirya* (pangkat, jabatan, kekuasaan), *artha* (harta benda, kekayaan) dan *wasis* (ilmu, kepandaian, keahlian). Jika salah satu saja tidak dipunyai, maka turunlah harga manusia tersebut, apalagi ketiga-tiganya tidak dimiliki. Jika yang terakhir ini terjadi, maka hilang total harga manusia tersebut (*telas tiling jalma*), bahkan harga manusia tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga daun jati kering yang jatuh ke atas permukaan tanah (*aji godhong jati aking*). Filosofi tentang harga manusia ini sangat jelas berorientasi pada budaya ningrat/keraton. Sebab, di sana paling tidak ditandai dengan faktor *wirya* sangat ditonjolkan dan bahkan diletakkan pada urutan pertama, sementara itu faktor *wasis* diletakkan di tempat terakhir yang justru faktor ini lebih dapat ditempuh dan relatif cepat diraih oleh orang-perorang. Dari sini dapat diduga, bagi kalangan ningrat/keraton *kewirangan* (rasa malu) akan mudah terjadi manakala faktor *wirya* yang dimiliki terganggu. Ini berarti mempertahankan *wirya* adalah harga mati. Ini boleh dikatakan, bahwa harga diri seseorang perlu dibungkus oleh “sistem”, dalam hal ini sistem kekuasaan. Jadi,

---

<sup>9</sup> Yayasan Mangadeg Surakarta, *Terjemahan Wedhatama* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 102.

rasa *wirang* bukan mempertahankan sesuatu yang bermula bersifat mem-”pribadi”, melainkan bertahan dari yang bersifat men-”sistem”. Karena itu menjadi sukar untuk menciptakan kesadaran *wirang* (peka rasa malu) yang berangkat dari kesadaran pribadi-pribadi. Akibatnya, seseorang akan lebih mudah mengandalkan pembelaan dari “sistem” yang ada (komunitas, teman sepaham/semadzhab, partai, organisasi, jaringan) yang dia masuk ke dalamnya. Karena itu dapat mudah dimengerti, mengapa apabila seseorang dalam keadaan terpojok, apalagi di kalangan pemimpin atau tokoh masyarakat yang disebabkan kekeliruannya, lalu buru-buru ungkapan lain yang dimunculkan dan diopinikan, yaitu ungkapan “*mikul dbuwur mendhem jero*” yang artinya menghargai dan memperlihatkan hal-hal yang baik (jasa dan tindakan positif terdahulu) dan menyembunyikan serapat-rapatnya hal-hal yang tidak baik (menghentikan sama sekali koreksi terhadap tindakan yang negatif terdahulu dan termasuk kritik positif sekalipun). Di sini antara *wirang pribadi* dan *wirang sistem* dicampur-adukkan dan saling dipakai secara simetris, kiri-kanan. Kalau terjadi *wirang pribadi* maka “sistem” menjadi pembelanya. Sebaliknya, jika terjadi *wirang sistem*, maka pribadi anggota sistem tersebut akan membelanya yang cenderung dengan berbagai macam cara (tak jarang meninggalkan prinsip keadilan dan proporsionalitas). Dalam kehidupan keluarga juga terwarnai oleh pengukuran harga diri ini yang baunya juga sangat elitis dengan ungkapan *bibit* (nasab orang tua), *bobot* (kekayaan, mata pencaharian) dan *bebet* (status sosial keturunan). Terkesan bahwa sebutan “garang-garing” yang artinya lebih mementingkan “garang” (tampak menonjol, berkilau, gagah, megah, tampak besar) sekalipun sesungguhnya “garing” (kurang memiliki potensi, berkekurangan, tidak kuat pertahanan). Budaya ningrat/keraton memang gayanya seperti itu dan tampaknya merasa tertuntut untuk melakukan dan berpegangan hidup seperti itu.

*Kedua*, ungkapan yang terkait dengan “hak”. Yang dimaksud di sini adalah lebih dari mempertahankan terhadap milik. Ungkapannya adalah “*sak dumuk bathuk sak nyari bumi ditobi pati?*”, yang artinya

sekalipun tanah hanya selebar dahi atau hanya sejengkal tanah akan dibela sampai darah penghabisan (*pati*). Rasa melekat pada milik yang begitu kuatnya bisa diduga banyak kaitannya dengan budaya ningrat/keraton yang mengutamakan *wirya* yang harus dipertahankan mati-matian di atas. Kalau budaya *wong cilik*/rakyat biasa yang bertempat tinggal di pedesaan justru malah berlaku ungkapan “*ngalah gedhe pungkasane*” yang artinya walaupun harus terpaksa mengalah (bukan karena kalah) untuk mencari solusi yang terbaik dan terbinanya kerukunan (*guyub*). Ungkapan terakhir sangat menguntungkan bagi kekokohan budaya ningrat/keratin yang terkait erat dengan *wirya* di atas. Kondisi etika “*ngalah*” tersebut masih dipertajam lagi, yang konon dari falsafah Sosrokartanan, yang ungkapannya sebagai berikut: “*nglurug tanpa bala*” (menyerang tanpa pasukan), “*menang tanpa ngasorake*” (meraih kemenangan tanpa melukai perasaan yang dikalahkan), dan “*sugih tanpa nyimpen*” (walaupun sesungguhnya kaya dan kuat tetapi tetap dalam tampilan biasa). Etika “*ngalah*” dan percabangannya ini secara faktual justru dijalankan di kalangan akar-rumput, tetapi tak begitu jelas pengamalannya di kalangan elit. Karena itu tak heran dalam praktik kehidupan di kalangan para pemimpin tampak jelas tingkah laku berebut kekuasaan, kekayaan, dan popularitas, sekalipun di kalangan arus bawah, rakyat biasa, justru hidupnya merasa tertekan keadaan, miskin, dan tidak dipedulikan. Dengan demikian kesadaran “hak” masih berlaku di tingkat elit yang berbingkai budaya ningrat/keraton atau budaya *urban*/kekotaan belum menyentuh secara adil dan menyeluruh, termasuk di kalangan rakyat bawah. Atau dengan lain kata rantai pemutar untuk menyadarkan “hak” sampai akar rumput masih terputus. Karena itu *wirang pribadi* atau *wirang sistem*, sekalipun tampak terang benderang, oleh kalangan yang berpaham budaya *urban*/kekotaan tidak merasa harus dihiraukan, toh orang-orang yang berbudaya *rural*/kedesaan tersebut sudah menghayati “*ngalah gedhe pungkasane*”. Keterputusan kesadaran “hak” antara yang berpaham ningrat/keraton (*urban*/kekotaan) dan yang berpaham *wong cilik* atau rakyat biasa (*rural*/kedesaan) inilah

yang menjadi pekerjaan rumah yang sangat mendesak untuk direkonstruksi agar *wirang pribadi* dapat muncul sehingga akan muncul karakter berani mengakui kesalahan secara pribadi/jantan, mengakui kesalahan secara *legawa* (sukarela), maupun mundur dari jabatan kalau dirinya memang merasakan tidak mampu mengembannya atau terjadi kekeliruan fatal dalam kebijakan-kebijakannya. Kalau ini dapat terwujud, maka akan menjadi kokoh dan akan dihayati serta diamankan sungguh-sungguh percabangan ungkapan yang mendukung, seperti ungkapan: “*ajining diri saka latbi lan budi?*” (harga diri itu tergantung pada ucapan dan kebaikan hati). Dengan demikian akan tidak bermudah-mudah para calon pemimpin untuk mengucapkan janji-janji yang akhirnya tidak ditepati, bahkan budinya pun tidak dijaga baik-baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, sudah masanya orientasi pandangan tentang “harga diri” tidak hanya diorientasikan pada busaya ningrat/keraton atau *urban*/kekotaan saja, melainkan harus seimbang diorientasikan pada budaya *wong cilik*/rakyat biasa atau *rural*/kedesaan secara proporsional. Demikian juga perlu dipisah secara tajam antara “wirang pribadi” dan “wirang sistem” dan masing-masing harus mempertanggungjawabkan secara sendiri-sendiri secara proporsional pula. Yang terakhir, perlu sekali penyadaran “hak” tanpa sekat-sekat budaya yang telah melembaga lama, seperti sekat budaya ningrat/keraton atau *urban*/kekotaan dan budaya wong cilik/rakyat biasa atau *rural*/kedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badrika, I Wayan dan Sulaeman, Setiadi. *Sejarah Nasional dan Dunia*, Jilid I, Jakarta: Erlangga, 1993.
- Darusaprapta. *Serat Wulang Reh Anggitan Dalem Sri Pakubuwana IV*, Surabaya: PT Citra Jaya Murti, 1995.

- Hariwijaya, M. *Filsafat Jawa: Ajaran Lubur Warisan Leluhur*, Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006.
- Jatmiko, Adityo. *Tafsir Ajaran Serat Wedhatama*, Yogyakarta: Pura Pustaka, 2005.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Kuntowijoyo. *Raja, Priyayi, dan Kawula*, Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Moedjanto, G. *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Mulder, Niels. *Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Nitihardjo, Soeprpto. *Andharan dan Tafsir Filsafat HA NA CA RA KA*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Saksono, Ignas G. dan Dwiyanto, Jaka. *Terbelahnya Kepribadian Orang Jawa: antara Nilai-Nilai Lubur dan Praktik Kehidupan*, Yogyakarta: Keluarga Besar Marhaenis DIY, 2011.
- Sholikhin, K. H. Muhammad. *Manunggaling Kawula Gusti: Filsafat Kemanunggalan Syekh Siti Jenar*. Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Soedarsana, Retno Astuti, dan Sunjata, I. W. Pantja. *Aksara dan Ramalan Nasib Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi) Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Sujamto. *Refleksi Budaya Jawa dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Semarang: Dahara Prize, 1992.
- Supriadi. *Kyai dan Priyayi di Masa Transisi*, Surakarta: Pustaka Cakra Surakarta, 2001.
- Susetya, Wawan. *Kepemimpinan Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2007.
- Wahyono, Pawarti, Nawangningrum, Dina dan W, Supriyanto. *Serat Piwulang Kawula*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Widyawati R., Wiwien. *Etika Jawa: Menggali Kebijakan dan Kentamaan demi Ketentraman Hidup Labir Batin*, Yogyakarta: Pura Pustaka, 2010.

Yayasan Mangadeg Surakarta. *Terjemahan Wedhatama*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

